



# PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN

**Amalia Adininggar Widyasanti, PhD**

**Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Bandung, 30 Juli 2019**





# Kerangka Paparan

01

**Isu-isu Utama Pembangunan Nasional**

02

**Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Penerapannya untuk Jawa Barat**

03

**Persoalan dan Strategi Penurunan Kemiskinan di Jawa Barat**



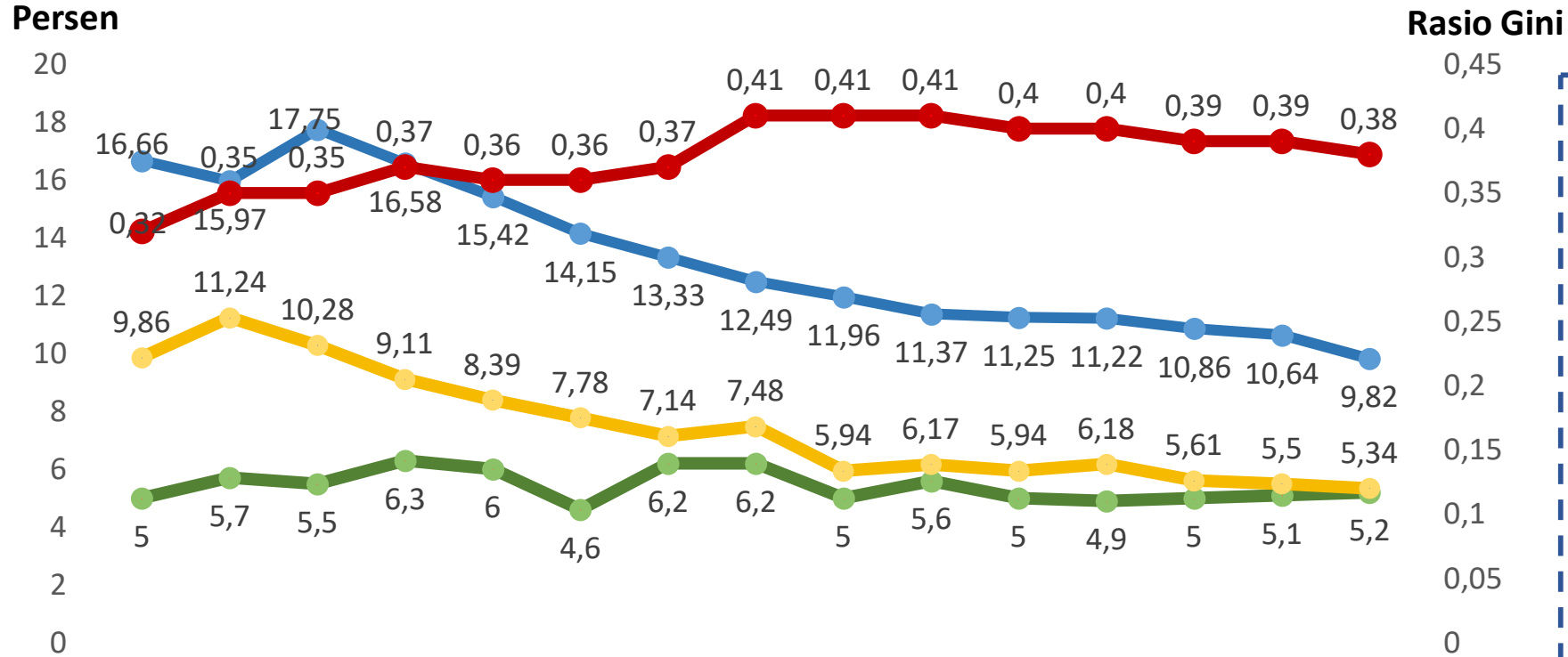
# ISU-ISU UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL



# Gambaran Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



## Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Rasio Gini (2004-2018)

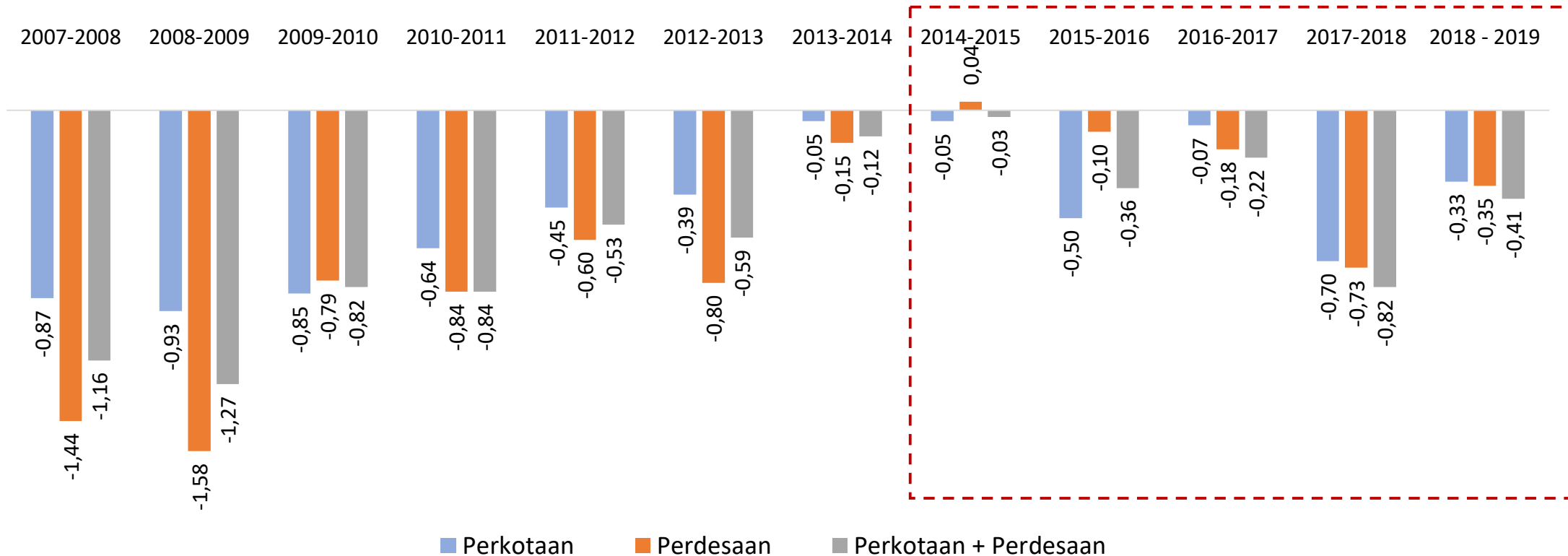


**Sudahkah pertumbuhan ekonomi bersifat *Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro-Equity*?**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun ketimpangan memiliki tren yang cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya.



# Dinamika Penurunan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 2007 - 2019



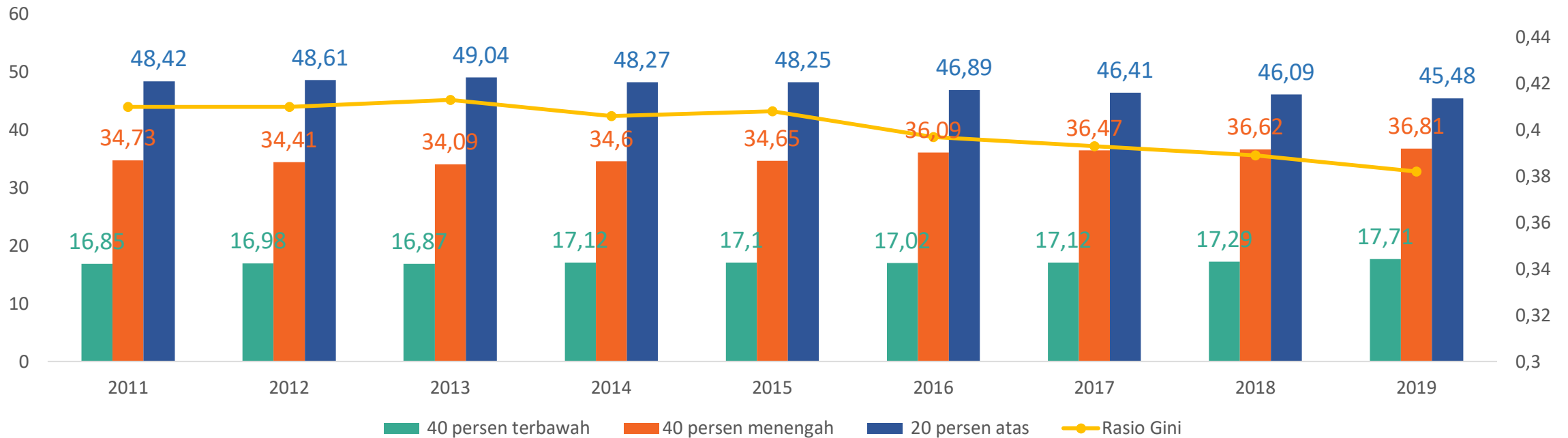
Sumber: BPS, Tahun 2007-2019 Angka Maret

- Meskipun terus menurun, periode Maret 2018-2019 terjadi perlambatan penurunan kemiskinan baik di desa maupun kota jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Penurunan kemiskinan semakin melambat seiring dengan bertambahnya provinsi yang menyentuh kemiskinan satu digit.
- Persoalan kemiskinan saat ini tidak lagi dapat diukur menggunakan metodologi kemiskinan saat ini sehingga perlu penyempurnaan metodologi yang dapat lebih akurat dalam menjelaskan efektivitas program-program penurunan kemiskinan.



# Tren dan Dimensi Ketimpangan Antar-Kelompok Pendapatan

## Distribusi pengeluaran perkapita dan rasio antara kelompok pengeluaran, 2004-2018

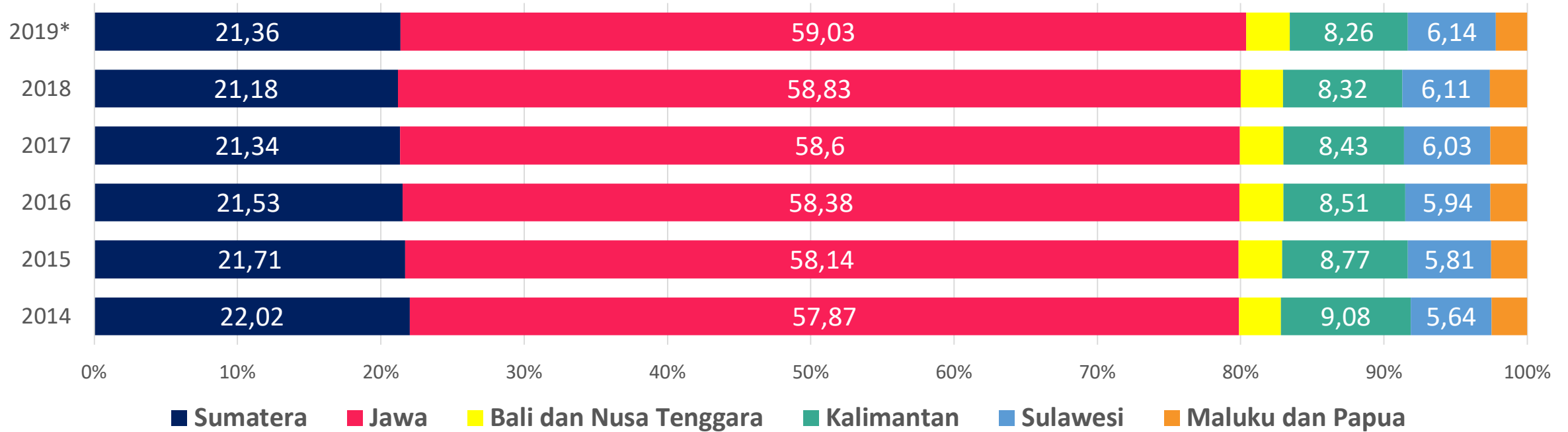


- Meskipun secara umum kelompok 20% teratas masih paling tinggi dalam hal distribusi pengeluaran per kapita, namun kelompok 40% terbawah terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir.
- Sejak 2011, distribusi pengeluaran kelompok 20% teratas meningkat, namun mulai tahun 2014, distribusi bergeser ke kelompok 40% menengah dan 40% terbawah. Hal ini sejalan dengan peningkatan Rasio Gini yang signifikan di periode 2011-2014 kemudian menurun setelahnya.



# Tren dan Dimensi Ketimpangan Antar-Wilayah

## Distribusi PDB berdasar Pulau 2014-2019



- Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tidak berubah dalam 4 tahun terakhir, didominasi oleh **Pulau Jawa (59,03%)** dan **Sumatera (21,36%)**.
- Perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di **Kawasan Barat Indonesia (KBI)**, sekitar **80-81%**. Sisanya, sekitar 19-20% berasal dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).
- Kedua hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang belum merata.



# KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DAN PENERAPANNYA UNTUK JAWA BARAT





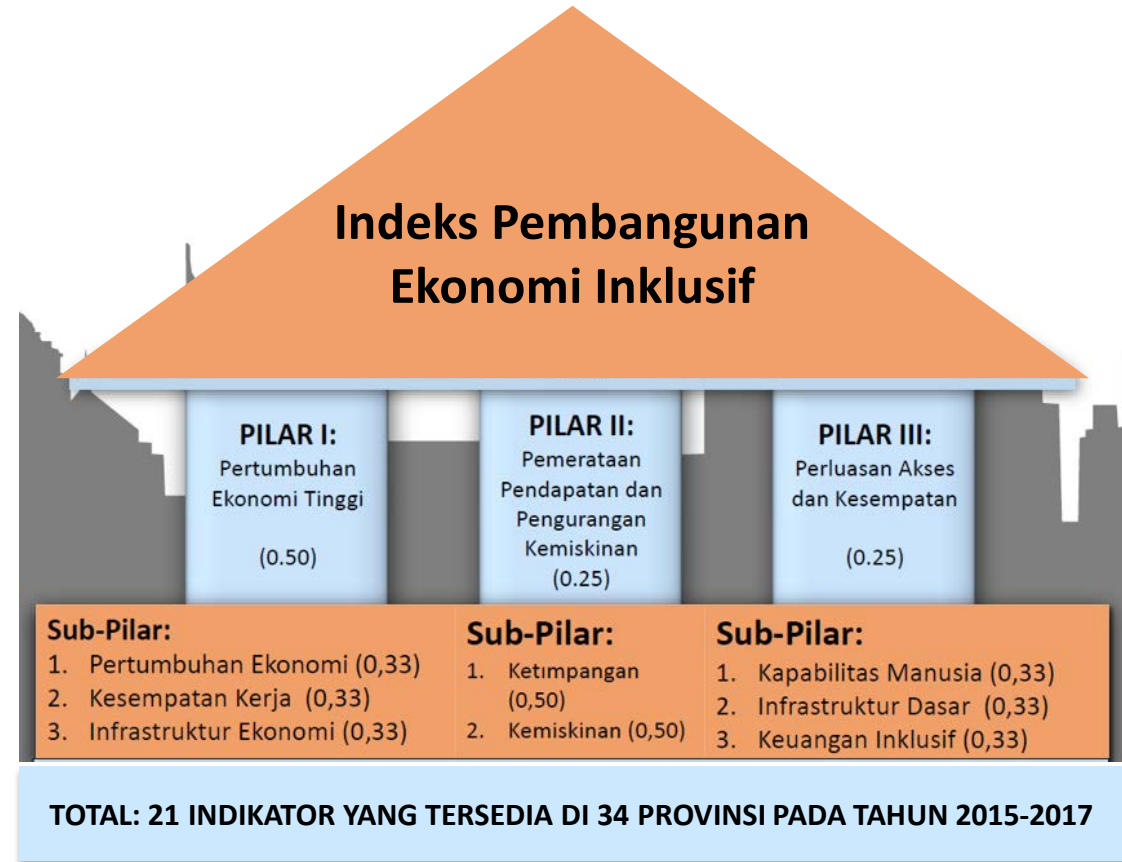
# Pembangunan Ekonomi Inklusif

## DEFINISI



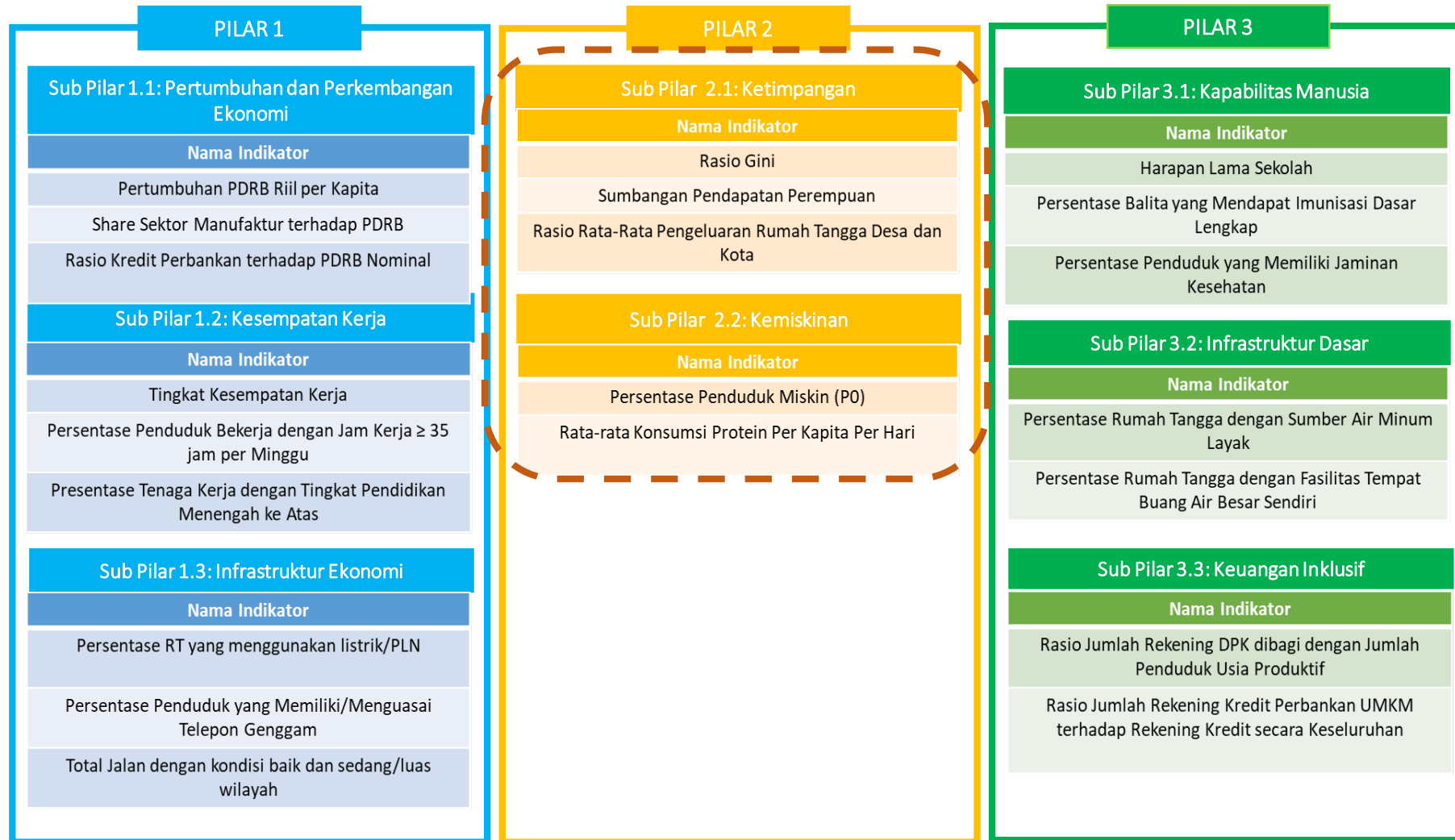
Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

## INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF





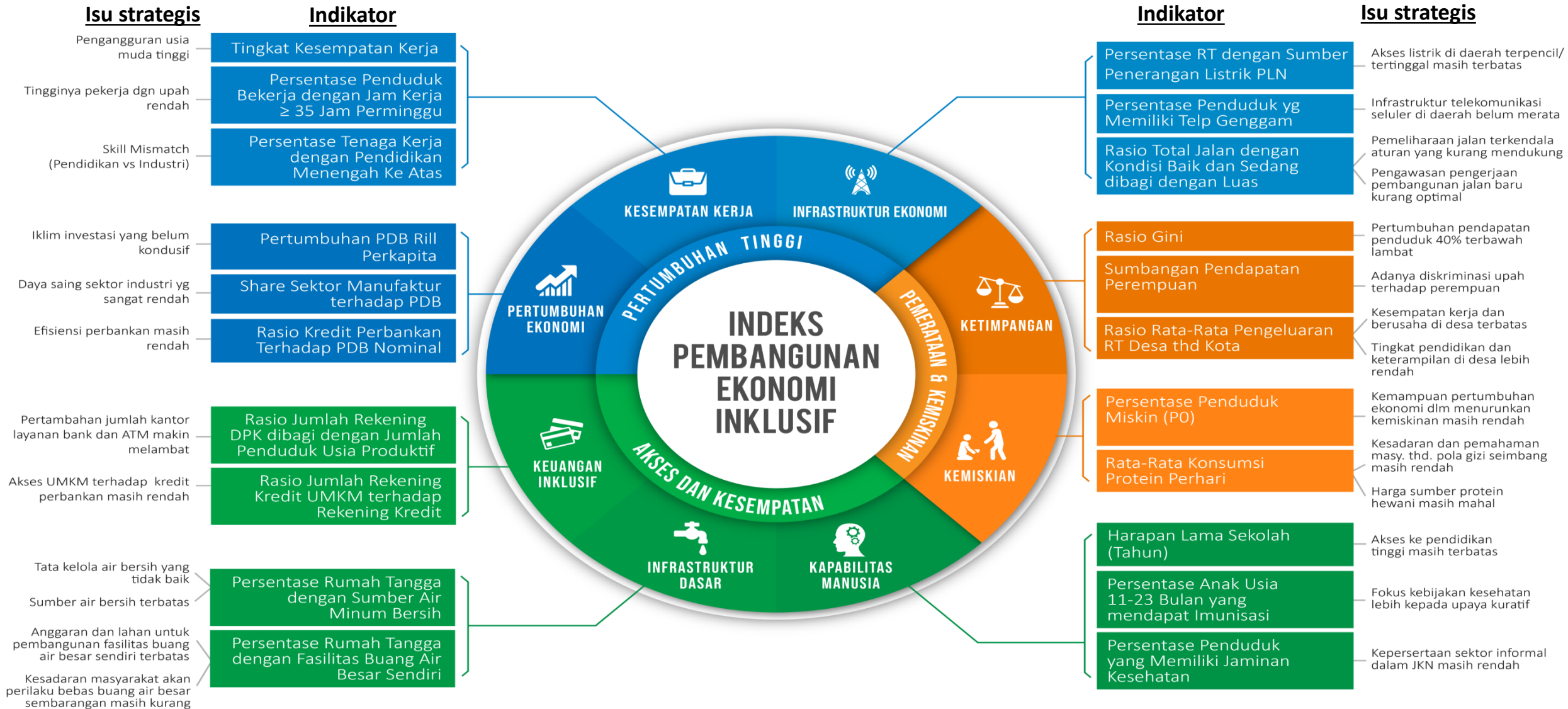
# Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Catatan: kecuali DKI Jakarta tidak memakai indikator rasio pengeluaran rumah tangga desa dan kota karena tidak ada pedesaan.



# Isu-isu Strategis dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

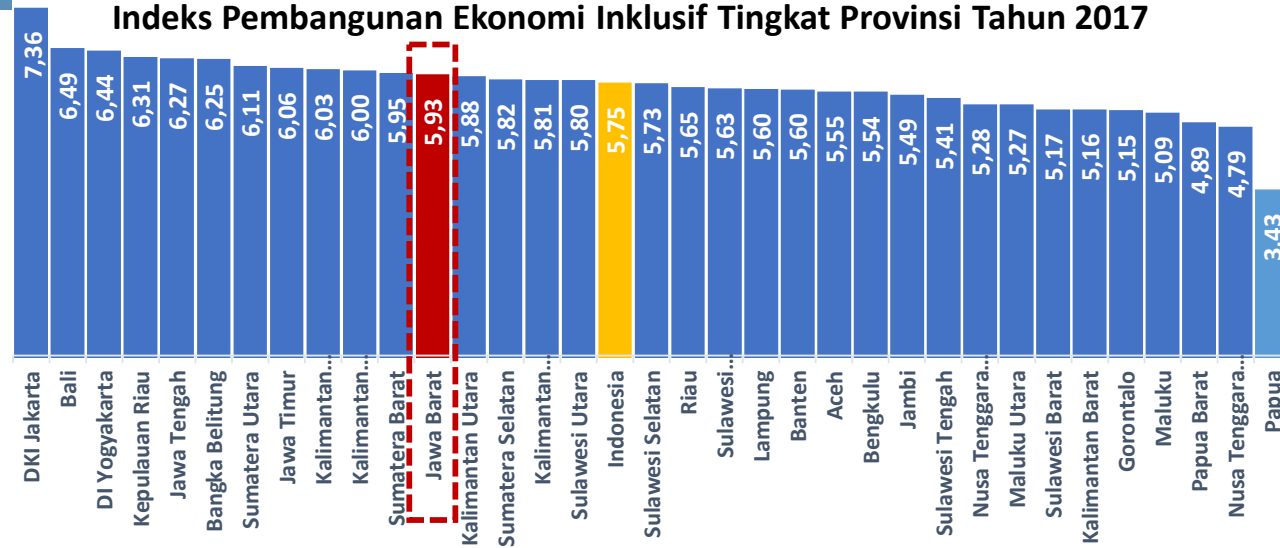




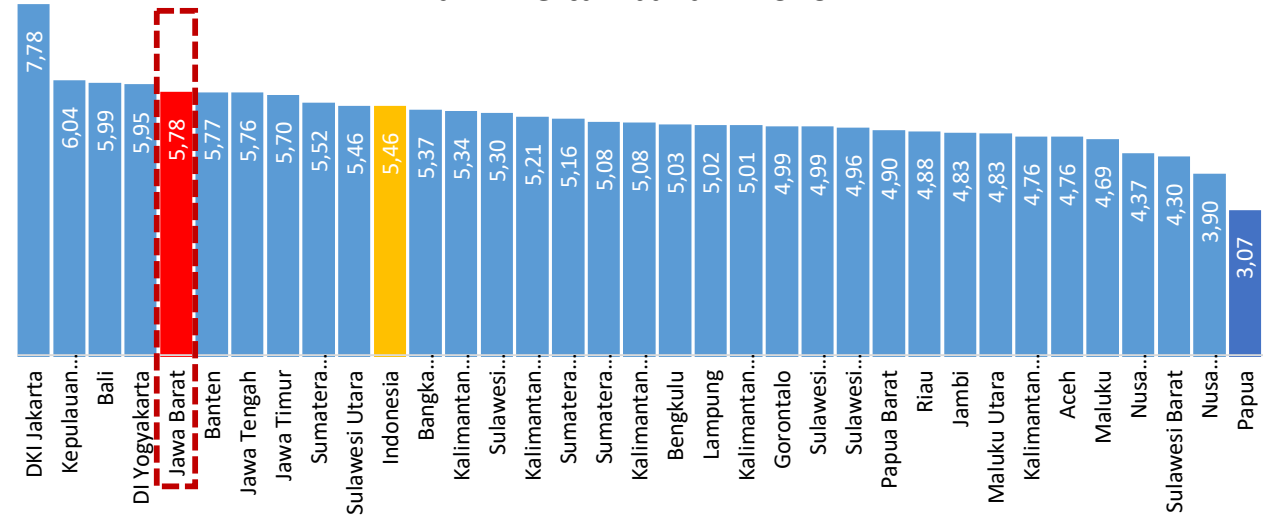
# Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Barat di antara provinsi lainnya



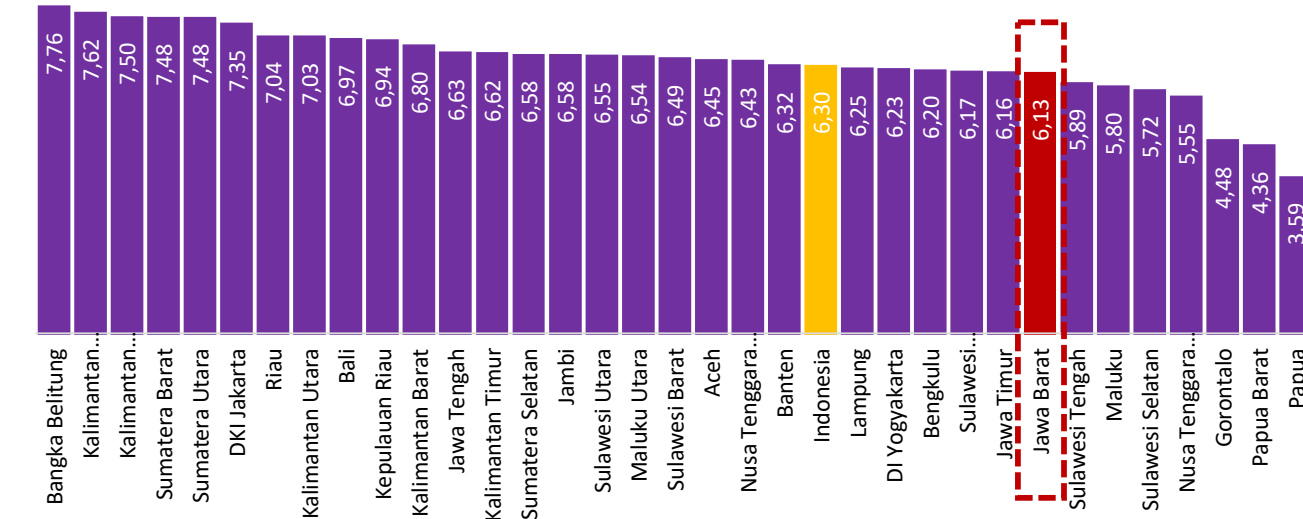
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2017



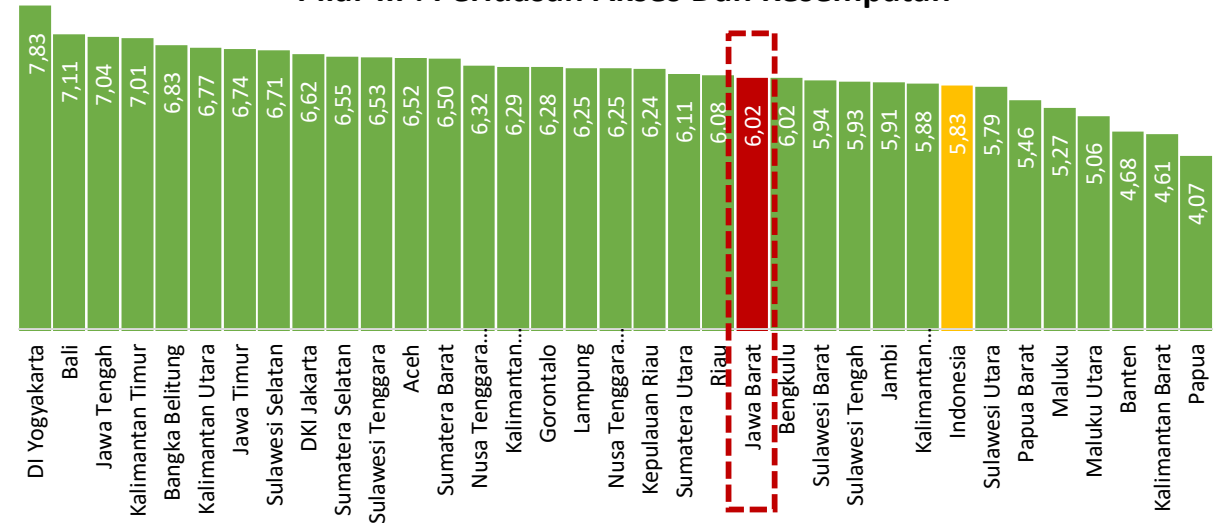
Pilar I : Pertumbuhan Ekonomi



Pilar II : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

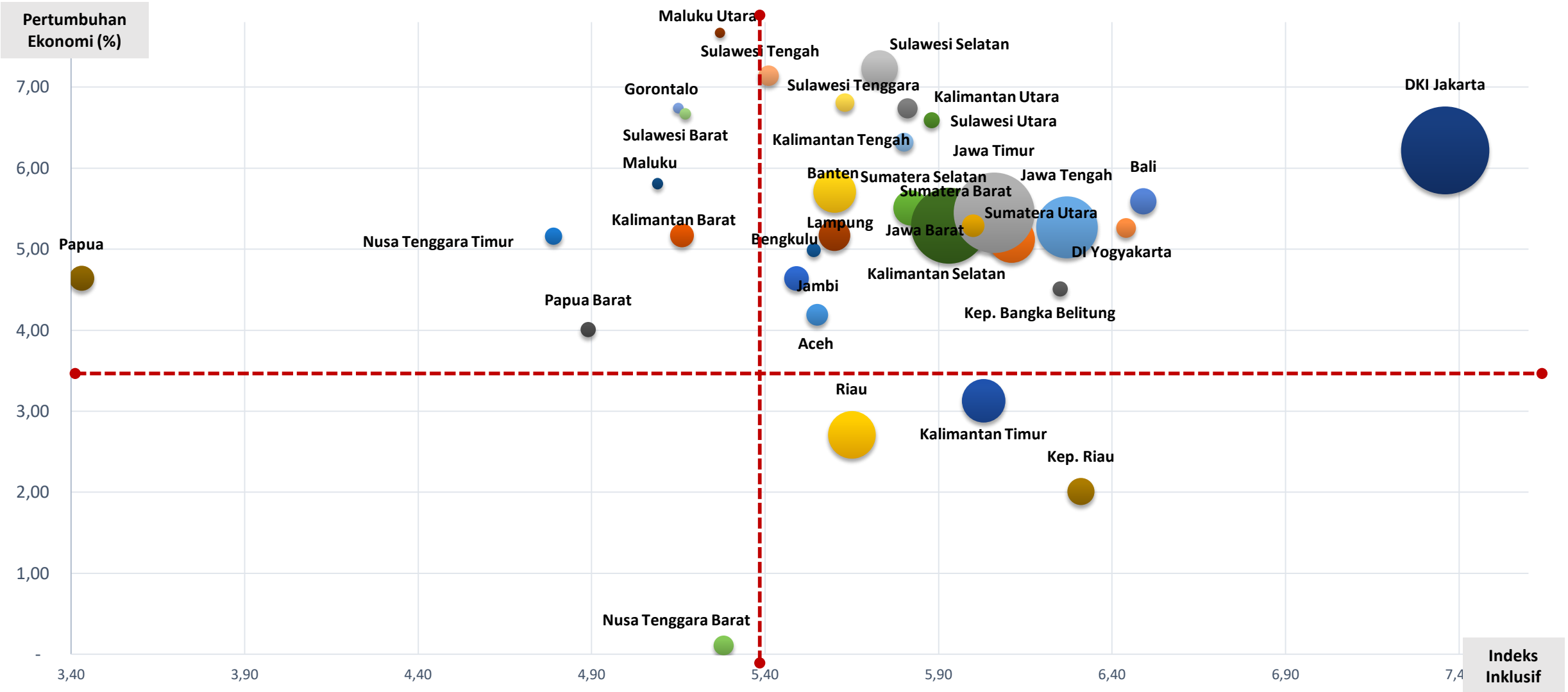


Pilar III : Perluasan Akses Dan Kesempatan





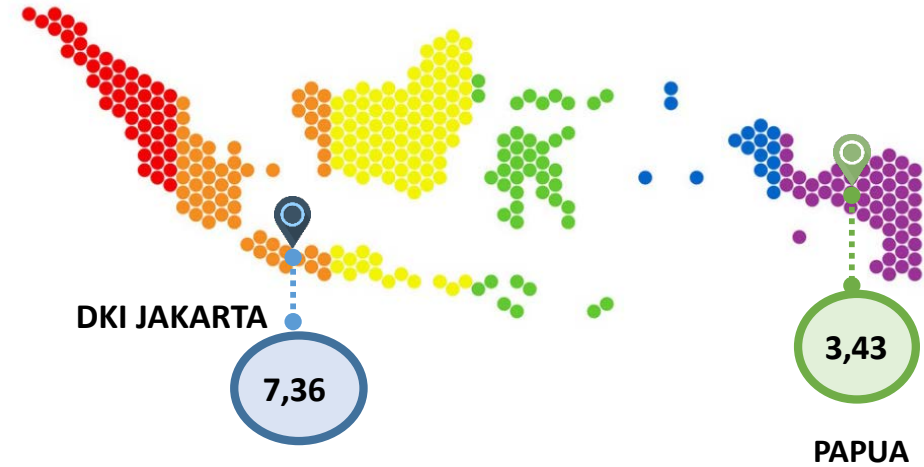
# Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk pembangunan yang inklusif (1)





# Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk pembangunan yang inklusif (2)

Provinsi	Indeks Inklusif	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3
DKI Jakarta	7.36	7.78	7.35	6.62
Bali	6.49	5.99	6.97	7.11
DI Yogyakarta	6.44	5.95	6.23	7.83
Kepulauan Riau	6.31	6.04	6.94	6.24
Jawa Tengah	6.27	5.76	6.63	7.04
Bangka Belitung	6.25	5.37	7.76	6.83
Sumatera Utara	6.11	5.52	7.48	6.11
Jawa Timur	6.06	5.70	6.16	6.74
Kalimantan Timur	6.03	5.34	6.62	7.01
Kalimantan Selatan	6.00	5.21	7.62	6.29
Sumatera Barat	5.95	5.08	7.48	6.50
Jawa Barat	5.93	5.78	6.13	6.02
Kalimantan Utara	5.88	5.01	7.03	6.77
Sumatera Selatan	5.82	5.16	6.58	6.55
Kalimantan Tengah	5.81	5.08	7.50	5.88
Sulawesi Utara	5.80	5.46	6.55	5.79
Sulawesi Selatan	5.73	5.30	5.72	6.71
Riau	5.65	4.88	7.04	6.08
Sulawesi Tenggara	5.63	4.99	6.17	6.53
Lampung	5.60	5.02	6.25	6.25
Banten	5.60	5.77	6.32	4.68
Aceh	5.55	4.76	6.45	6.52
Bengkulu	5.54	5.03	6.20	6.02
Jambi	5.49	4.83	6.58	5.91
Sulawesi Tengah	5.41	4.96	5.89	5.93
Nusa Tenggara Barat	5.28	4.37	6.43	6.32
Maluku Utara	5.27	4.83	6.54	5.06
Sulawesi Barat	5.17	4.30	6.49	5.94
Kalimantan Barat	5.16	4.76	6.80	4.61
Gorontalo	5.15	4.99	4.48	6.28
Maluku	5.09	4.69	5.80	5.27
Papua Barat	4.89	4.90	4.36	5.46
Nusa Tenggara Timur	4.79	3.90	5.55	6.25
Papua	3.43	3.07	3.59	4.07

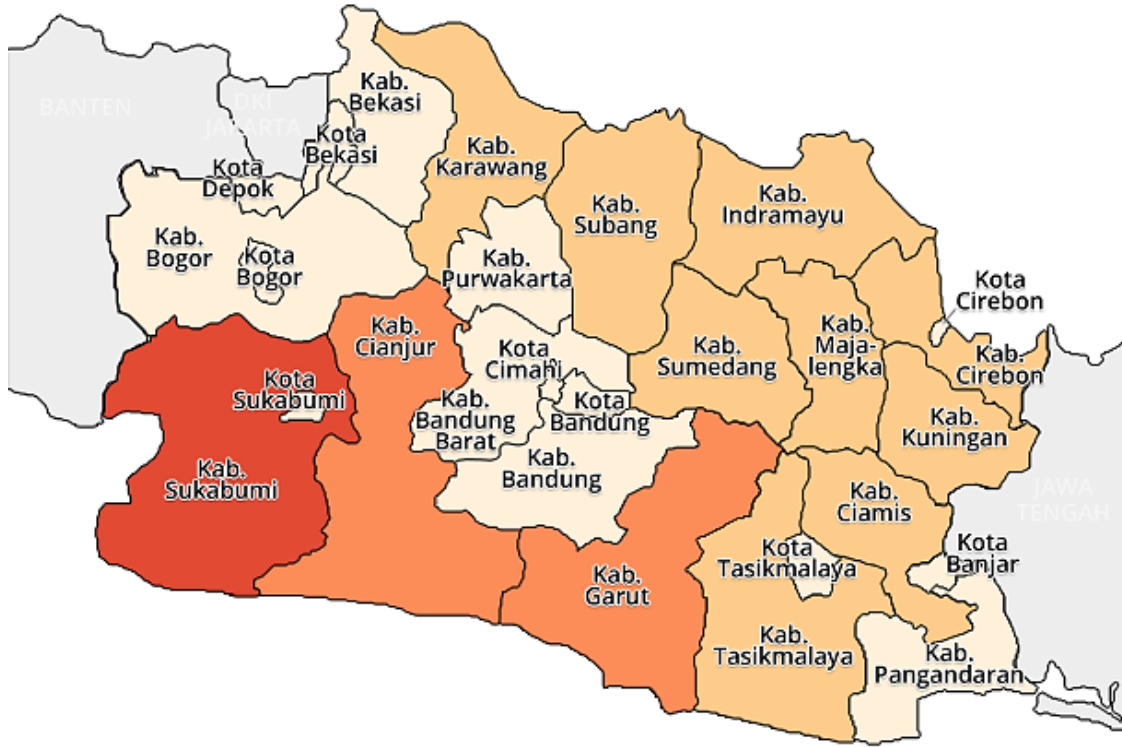


**Inklusivitas pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.**

**Beberapa wilayah menunjukkan perkembangan yang baik untuk pilar tertentu, namun masih tertinggal pada pilar-pilar pembangunan inklusif lainnya.**



# Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017



Masih terdapat setidaknya 8  
Kab/Kota dengan tingkat  
inklusi yang sangat  
rendah

Kab/Kota	Indeks Inklusif	Indeks Pilar 1	Indeks Pilar 2	Indeks Pilar 3	Peringkat (dari 460)
Kota Cirebon	6.19	5.79	6.11	7.14	14
Kota Depok	6.09	5.91	6.63	5.96	21
Kota Bandung	6.02	5.84	6.38	6.06	28
Kota Banjar	5.96	5.27	6.25	7.30	37
Kota Sukabumi	5.93	5.47	6.10	6.77	43
Kota Cimahi	5.92	5.84	6.32	5.69	45
Bekasi	5.87	5.99	6.43	5.16	55
Kota Bogor	5.81	5.82	5.96	5.64	67
Kota Bekasi	5.80	5.90	6.41	5.09	68
Kota Tasikmalaya	5.79	5.45	6.22	6.08	72
Bandung	5.76	5.57	6.62	5.37	77
Karawang	5.71	5.63	6.41	5.25	84
Purwakarta	5.56	5.51	6.31	4.98	117
Indramayu	5.55	4.95	6.91	5.59	121
Sumedang	5.47	4.94	6.51	5.65	140
Bogor	5.46	5.39	6.15	4.98	143
Majalengka	5.45	4.84	6.59	5.72	152
Kuningan	5.40	4.68	6.69	5.81	167
Ciamis	5.25	4.60	6.56	5.48	228
Subang	5.25	4.76	6.74	4.97	230
Cirebon	5.20	4.89	6.61	4.64	254
Bandung Barat	5.14	5.11	6.21	4.29	279
Sukabumi	5.11	4.62	6.55	4.88	286
Tasikmalaya	5.04	4.48	6.45	4.97	309
Garut	5.03	4.55	6.26	4.92	314
Cianjur	4.99	4.53	6.33	4.78	331



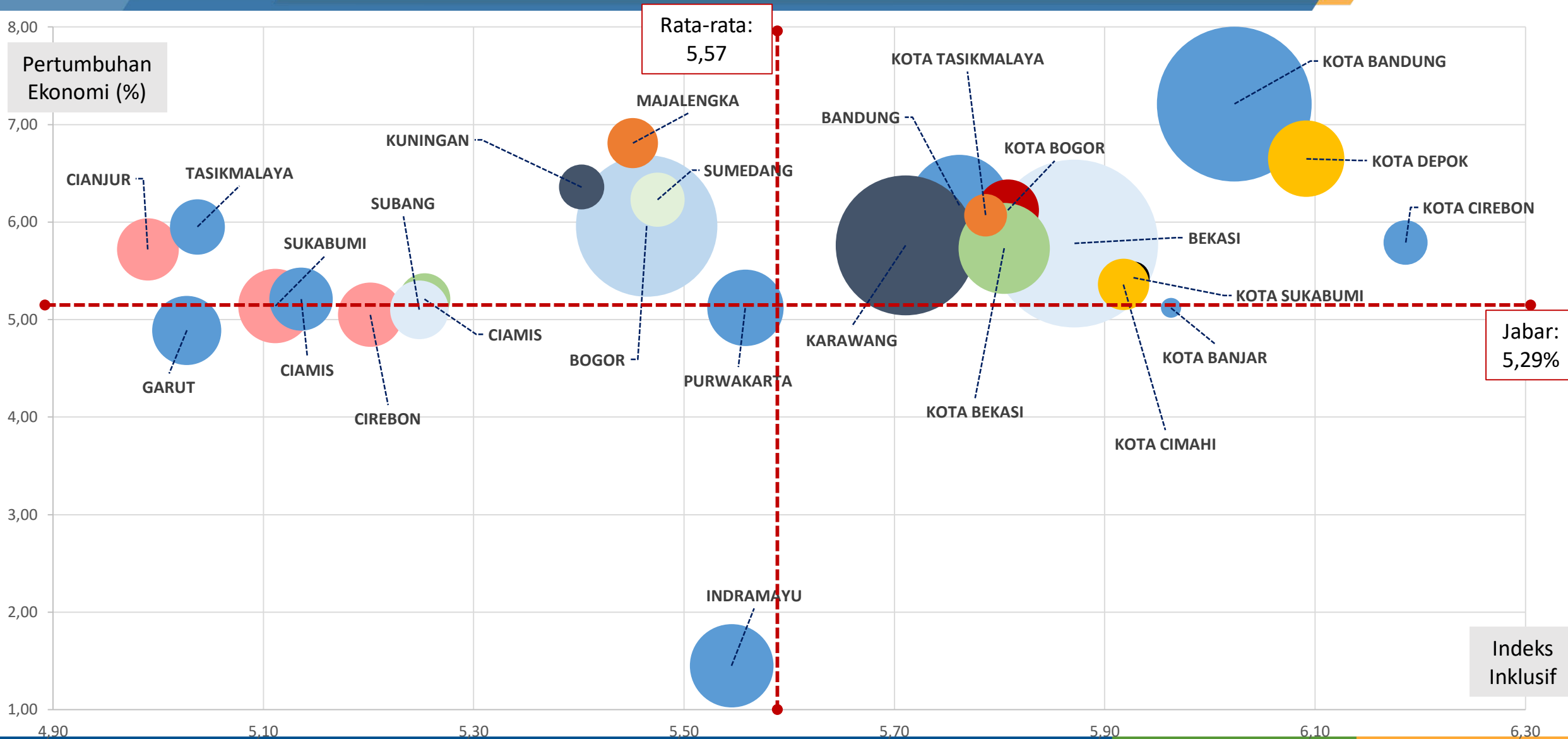
# Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017

	Pertumbuhan PDRB/kapita	Share Manufaktur	Rasio Kredit Perbankan	Kesempatan Kerja	Bekerja Penuh	Pekerja Berkualitas	RT dg Akses Listrik PLN	Memiliki Telepon Genggam	Rasio Mantap Jalan /Luas Wilayah	Rasio Gini	Sumb. Pendapatan Perempuan	Rasio - Desa/Kota	Tingkat Kemiskinan	Rata-rata Konsumsi Protein	Harapan Lama Sekolah	Balita dg Imunisasi Dasar	Penduduk dg Jamkes	RT dg Sumber Air Minum Layak	RT dg Fasilitas BAB Sendiri	Rasio Rekening DPK	Rasio Total Kredit UMKM
Bogor																					
Sukabumi																					
Cianjur																					
Bandung																					
Garut																					
Tasikmalaya																					
Ciamis																					
Kuningan																					
Cirebon																					
Majalengka																					
Sumedang																					
Indramayu																					
Subang																					
Purwakarta																					
Karawang																					
Bekasi																					
Bandung Barat																					
Pangandaran																					
Kota Bogor																					
Kota Sukabumi																					
Kota Bandung																					
Kota Cirebon																					
Kota Bekasi																					
Kota Depok																					
Kota Cimahi																					
Kota Tasikmalaya																					
Kota Banjar																					





# Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Inklusif Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017



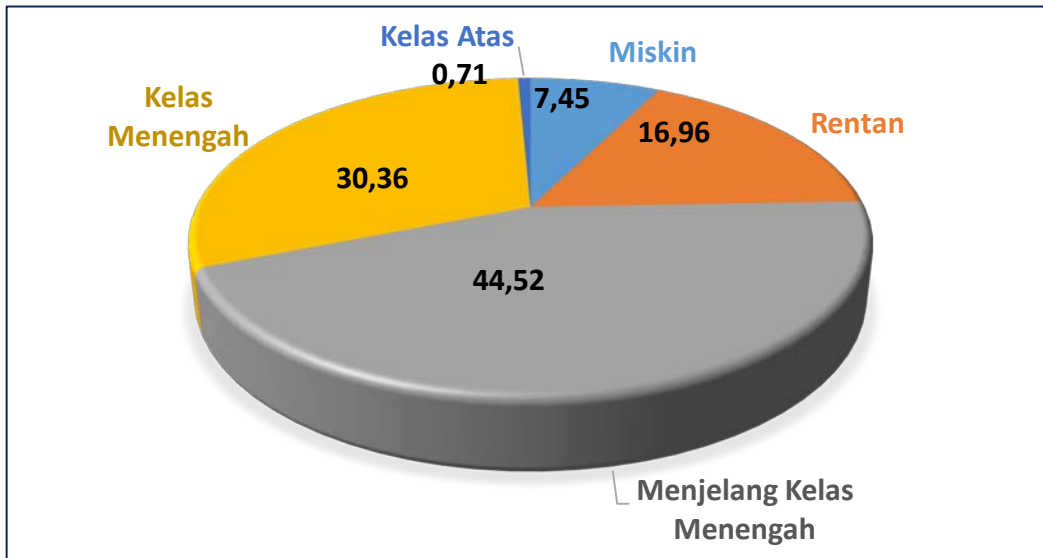


# PERSOALAN DAN STRATEGI PENURUNAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT



# Jawa Barat Dihadapkan Tantangan Jumlah Penduduk Rentan Miskin yang Cukup Besar

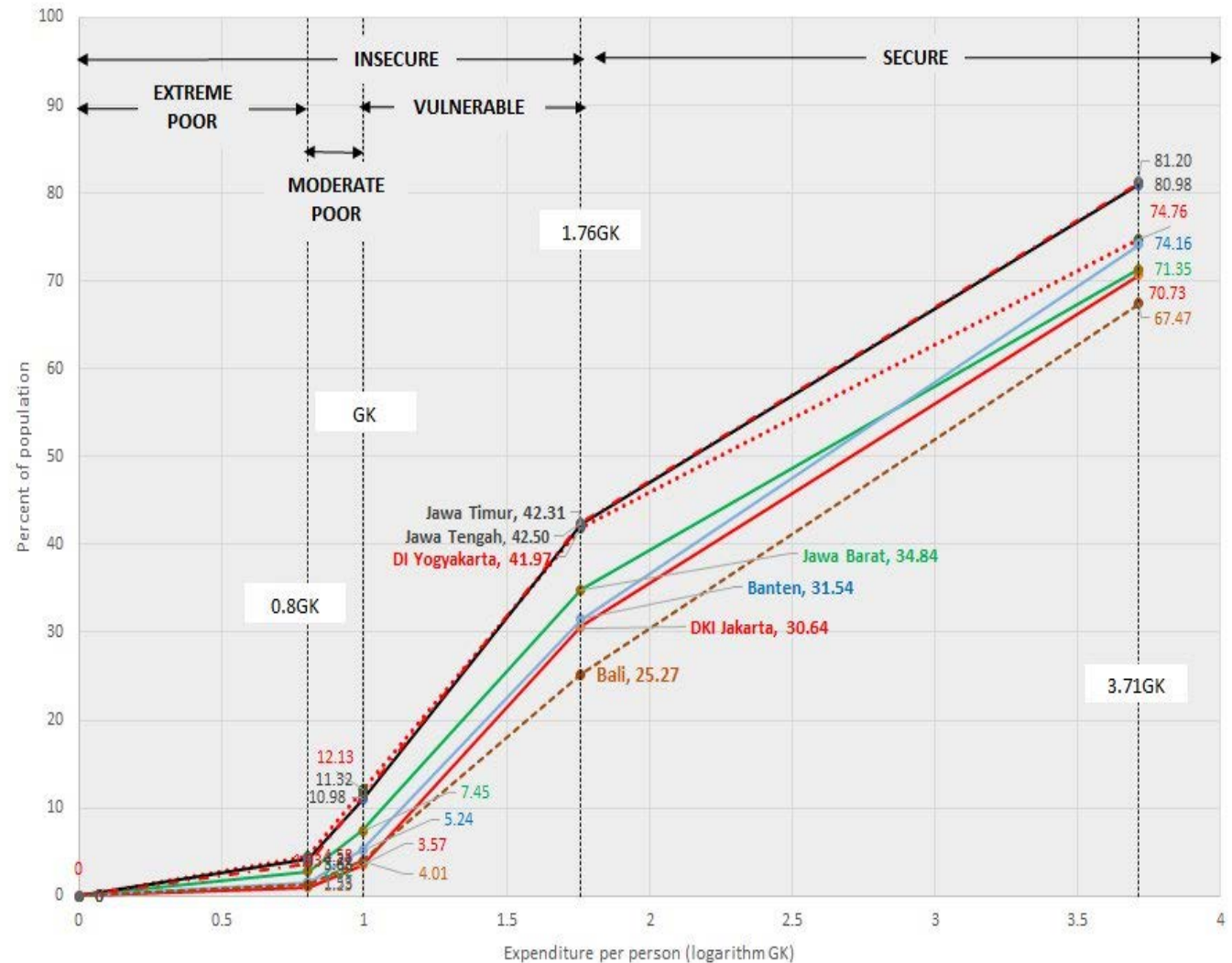
## Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan Prov. Jabar Tahun 2018



Sumber : Susenas 2018, diolah oleh Bappenas

- Proporsi penduduk rentan lebih besar dibandingkan kelompok yang miskin
- Penduduk rentan miskin sebesar 8,23 juta jiwa (16,96% dari total Penduduk Jabar)
- Kerentanan Jabar menduduki posisi ke-4 paling tinggi setelah Jatim, Jateng, dan DIY di Pulau Jawa

## Cummulative Distribution Function (CDF) of expenditure per person of JAWA 2018





# Dinamika Kemiskinan Provinsi Jawa Barat 2014 - 2019



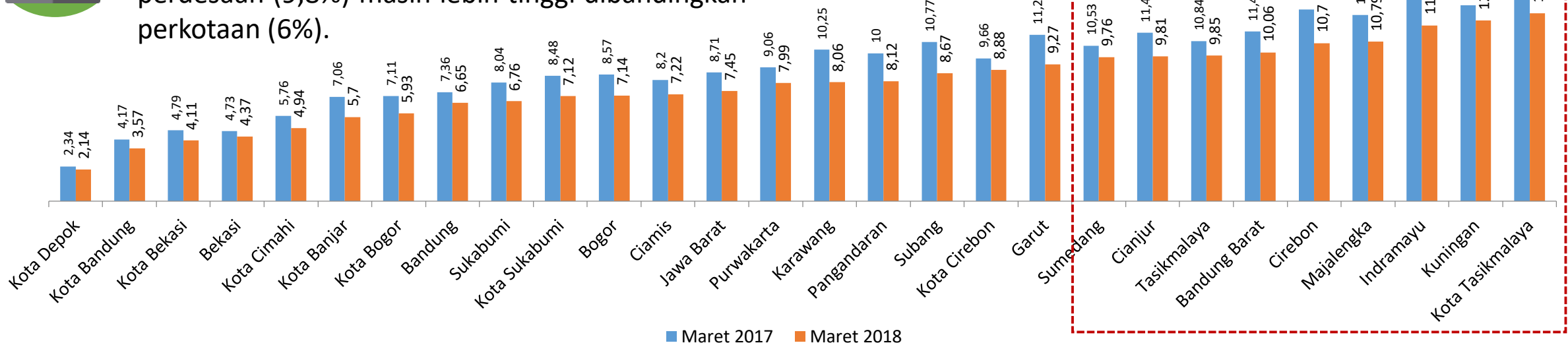
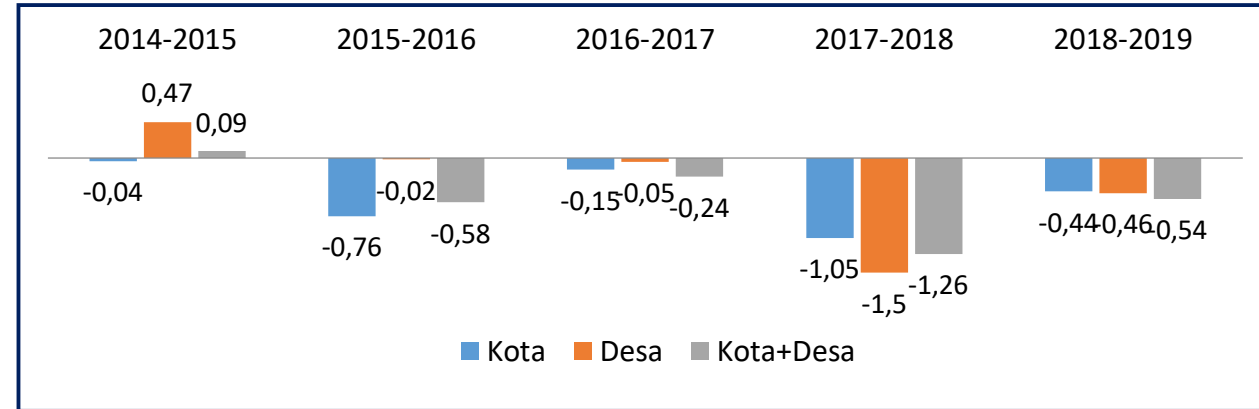
Jumlah penduduk miskin Jabar dalam setahun berkurang 0,22 ribu jiwa (0,54%) menjadi 3,4 juta jiwa pada Maret 2019.



Laju penurunan kemiskinan di Jabar juga mengalami pelambatan, baik di perkotaan maupun perdesaan.



Terdapat 9 kabupaten/kota dengan kemiskinan lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di perdesaan (9,8%) masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6%).



Sumber: BPS, Tahun 2007-2019 Angka Maret



# Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Belum Dinikmati Seluruh Penduduk

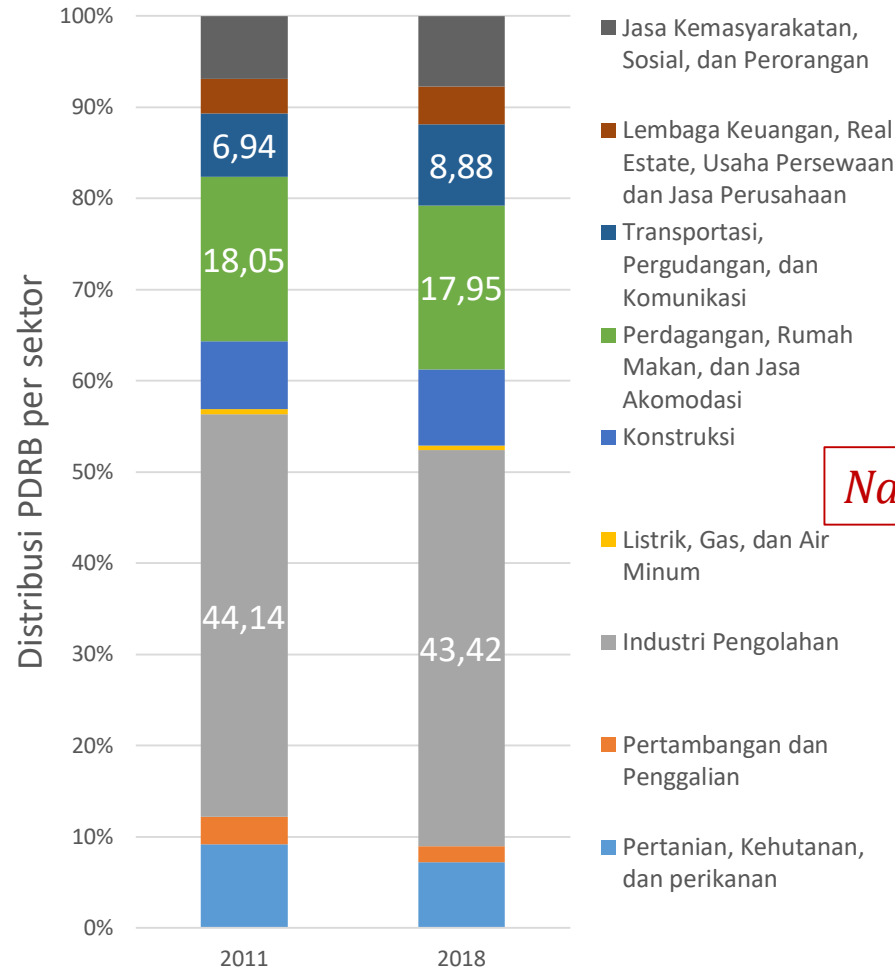


Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Tahun 2018

# 5,64%

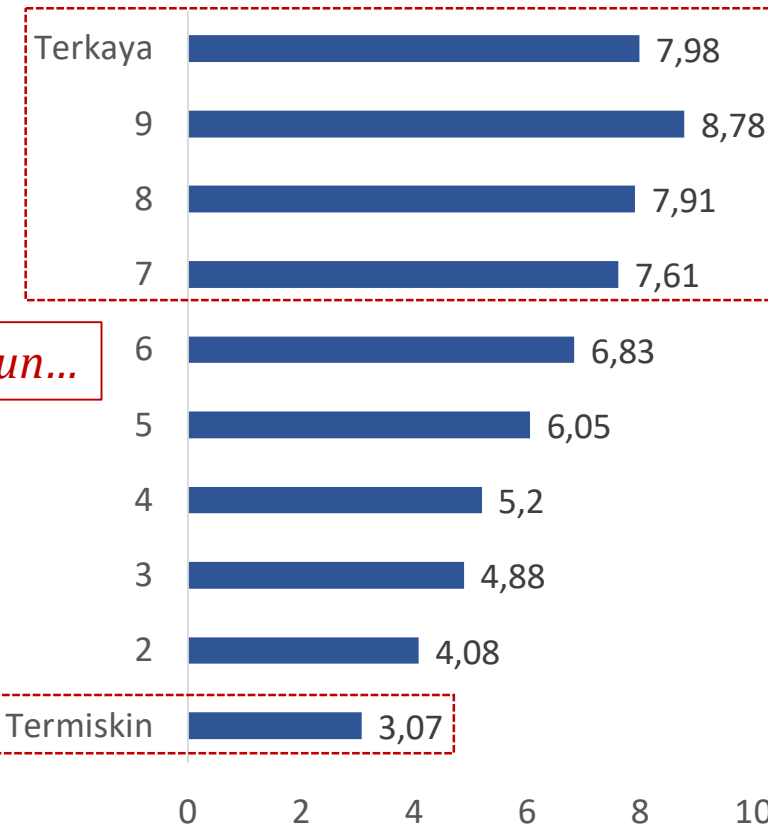
- Pertumbuhan ekonomi di Jabar didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi.
- Masih ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kelompok penduduk miskin dan kaya.
- Selama setahun terakhir, tingkat ketimpangan di Jabar menurun sebesar 0.005 poin menjadi 0,402 tahun 2019.

## PDRB 2011 dan 2018



## Sektor

## Kurva Insiden Pertumbuhan Prov. Jawa Barat, 2013 – 2018



*Namun...*

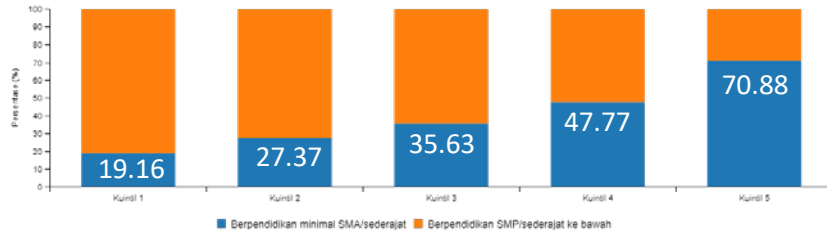


# Pelayanan Dasar Masih Rendah Terutama pada Kelompok Miskin

39,5%

Berpendidikan SMA Ke Atas

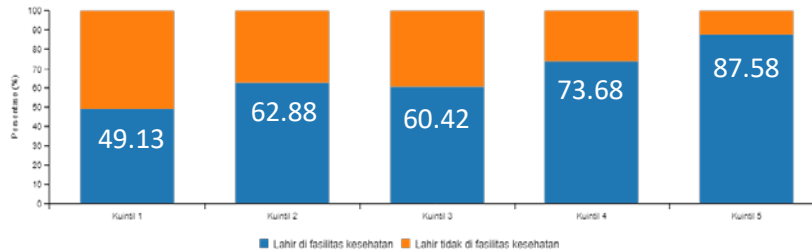
Berpendidikan SMA Ke Atas  
Tahun 2018 di Prov. Jawa Barat



63,4%

Lahir di Faskes

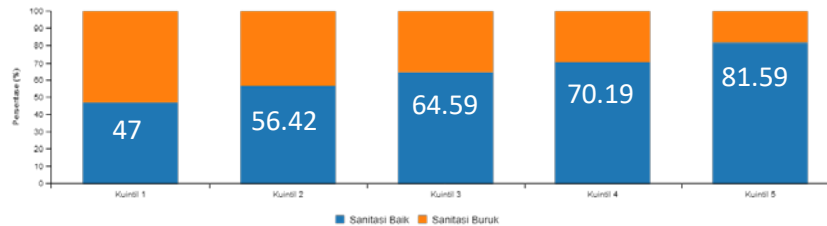
Kelahiran di Fasilitas Kesehatan  
Tahun 2018 di Prov. Jawa Barat



63,9%

Sanitasi Layak

Sanitasi Layak  
Tahun 2018 di Prov. Jawa Barat



- Sebesar 60% penduduk di Jawa Barat tidak menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Kuintil 1 paling banyak, yaitu lebih dari 80%.

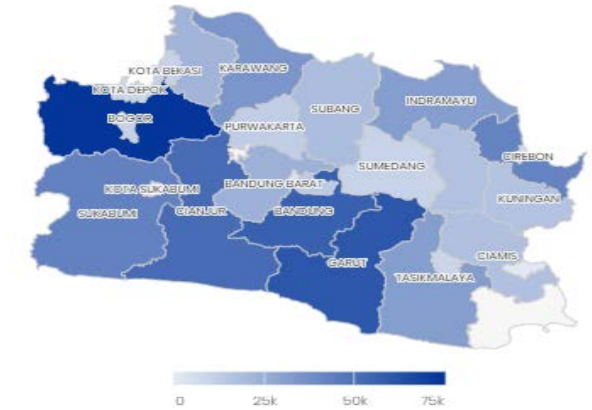
- Berdasarkan data BDT 2015, jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16 – 18 tahun terbanyak berada di Bogor, Garut, Bandung dan Cianjur.

- Lebih dari 50% penduduk kuintil 1 tidak melahirkan di fasilitas kesehatan.

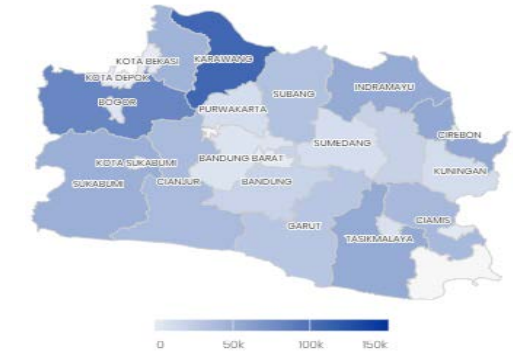
- Masih terdapat ketimpangan pada akses sanitasi layak, lebih dari 50% sanitasi buruk berada di kuintil 1.

- Berdasarkan data BDT 2015, jumlah rumah tangga miskin yang banyak tidak memiliki jamban adalah Karawang, Bogor, Cirebon, dan Indramayu.

Anak dengan Kondisi Kesejahteraan s/d 40%  
Usia 16-18 Tahun yang Tidak Bersekolah  
BDT 2015



Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan  
s/d 40% Tidak Memiliki Jamban  
BDT 2015





# Masih Banyaknya Kab/Kota dengan Kapasitas Fiskal Tinggi namun Memiliki Tingkat Kemiskinan yang Juga Tinggi..

## Kapasitas Fiskal Daerah

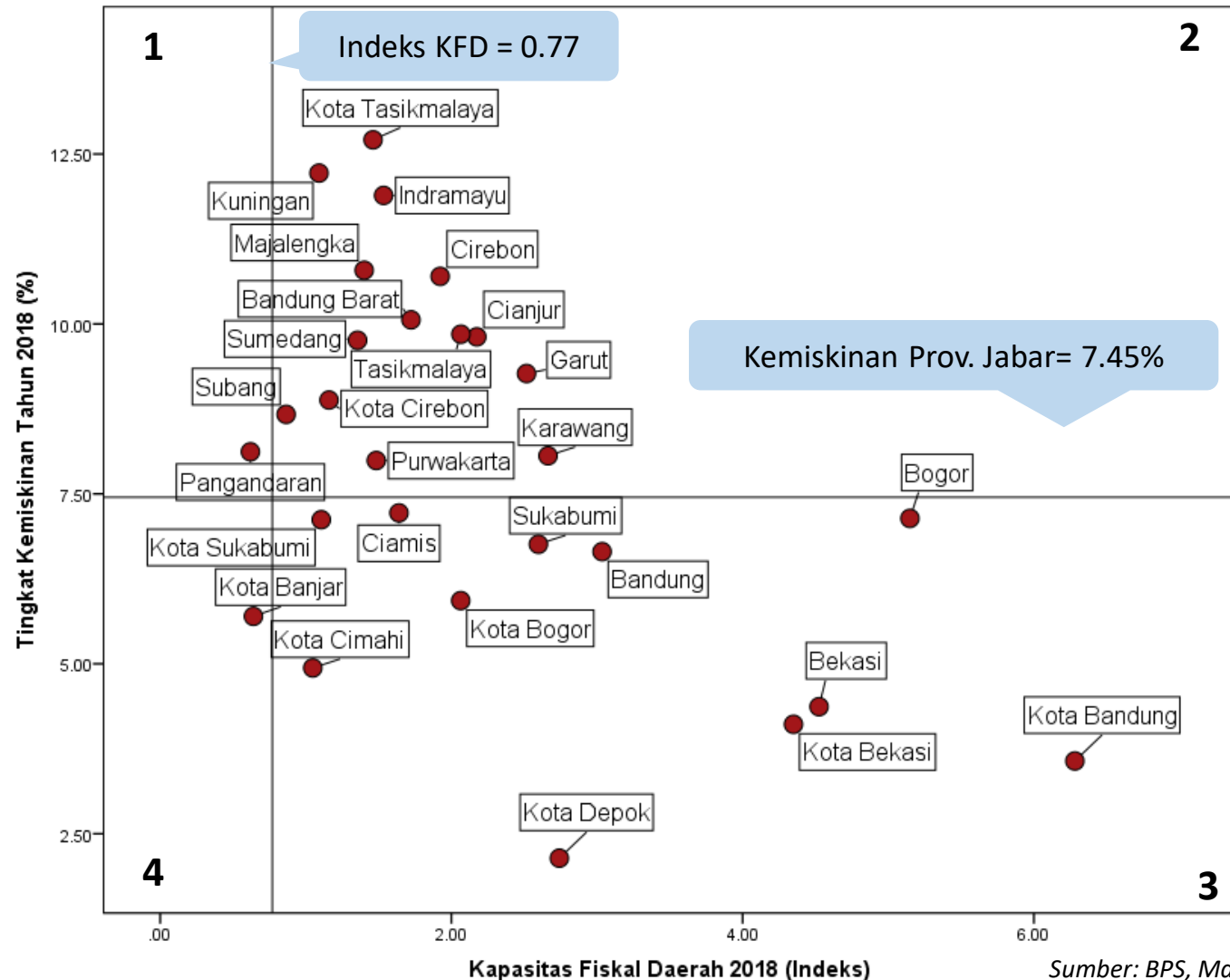
- ❑ Kab/kota di kuadran 2 seperti Kota Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Cianjur, Garut, Karawang, dll., memiliki kapasitas fiskal tinggi namun tingkat kemiskinan tinggi
- ❑ Kabupaten Pangandaran memiliki kapasitas fiskal rendah dan tingkat kemiskinan tinggi

## Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat mayoritas masuk kategori 2

Jumlah Kab/Kota Per Pulau	Kategori				Total
	1	2	3	4	
Provinsi Jabar	1	14	11	1	27

Kategori:

1. Tingkat kemiskinan tinggi dan kapasitas fiskal rendah
2. Tingkat kemiskinan tinggi dan kapasitas fiskal tinggi
3. Tingkat kemiskinan rendah dan kapasitas fiskal tinggi
4. Tingkat kemiskinan rendah dan kapasitas fiskal rendah



Sumber: BPS, Maret 2018  
Kemenkeu, Agustus 2018



# Strategi untuk Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan



## Mendorong hidup yang berkualitas dan bermartabat

Melalui peningkatan kualitas layanan dasar, a.l.:

- Perluasan cakupan identitas hukum.
- Peningkatan akses dan kualitas JKN, promosi kesehatan, pengendalian konsumsi rokok.
- Peningkatan akses dan kualitas sekolah, dan sekolah kejuruan.
- Peningkatan kualitas perumahan, air bersih, sanitasi.
- Peningkatan akses energi bersih dan modern.

## Meningkatkan ketahanan masyarakat

Melalui perlindungan sosial yang komprehensif:

- Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran: Kartu Sembako Murah, KIP dan KIP Kuliah, PKH, bantuan untuk kelompok rentan (disabilitas, lansia, masyarakat adat, anak telantar)
- Jaminan sosial: asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan.
- Perlindungan sosial adaptif – mitigasi dan bantuan saat bencana.

## Memberikan kesempatan yang sama untuk semua

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan peluang yang sama dan pengembangan kapasitas untuk mendorong tumbuhnya kelompok menengah yang tangguh:

- **Perkotaan:** ekonomi digital, kemitraan kelompok miskin dan rentan/usaha mikro, kecil dan menengah untuk nilai tambah dan akses pasar.
- **Pedesaan:** meningkatkan produktivitas agraria, Reformasi Agraria dan Kehutanan Sosial. Kemitraan untuk nilai tambah dan akses pasar.





# Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Miskin dan Rentan

## Penguatan perekonomian kelompok menengah bawah melalui:

- Mempermudah ijin usaha bagi pemula
- Memperkuat usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi
- Meningkatkan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian

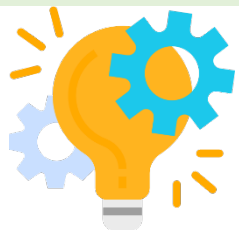


## Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah:

- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (a.l. air bersih, sanitasi, listrik, jalan).
- Penguatan perekonomian lokal yang inklusif.
- Pengendalian migrasi penduduk ke perkotaan.

## Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan ekonomi produktif:

- Memperkuat jaringan dan konektivitas (a.l. jalan, telekomunikasi/sinyal, transportasi penyeberangan).
- Mengembangkan nilai tambah produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor.
- Menjaga stabilisasi harga, terutama pangan.



## Pemanfaatan teknologi informasi:

- Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan perluasan jangkauan (misal: listrik mikro hidro).
- Stimulasi inovasi dan ide kreatif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

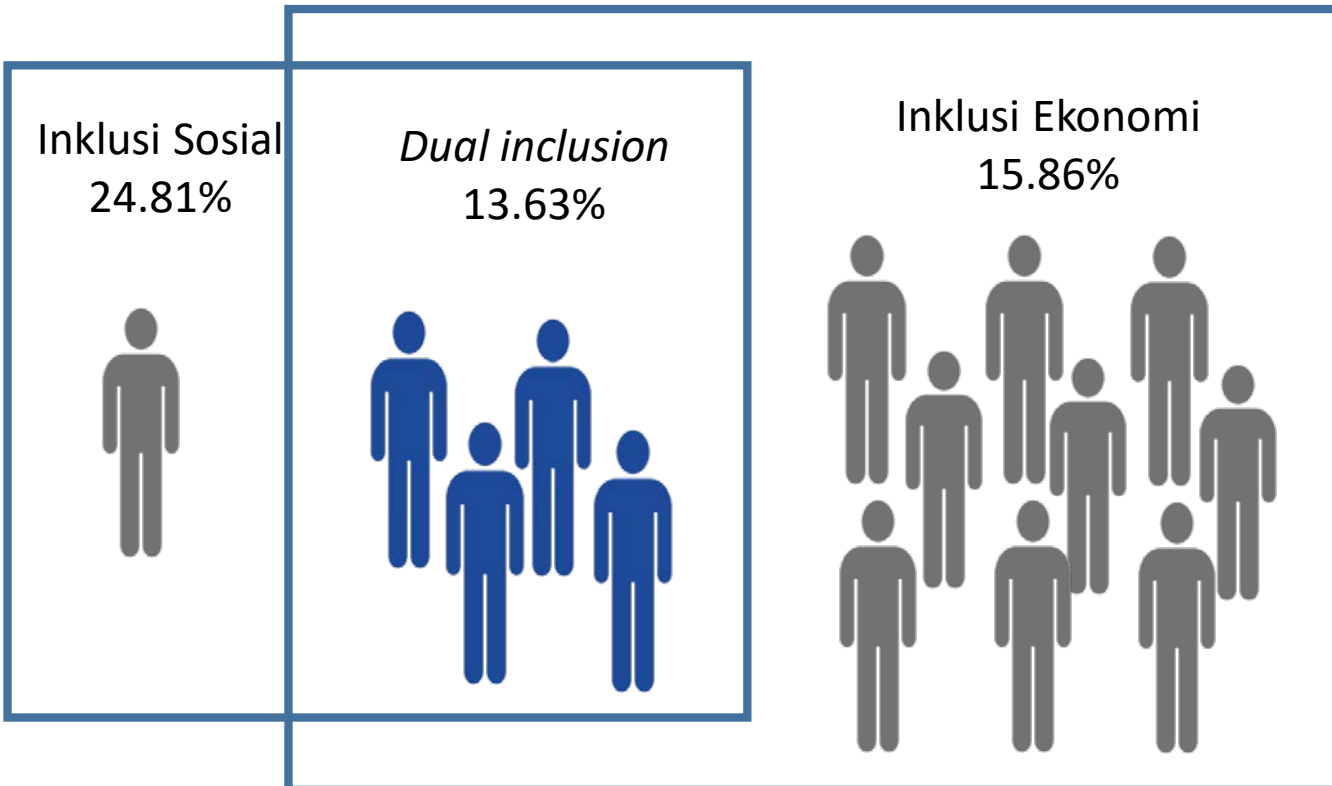


# Kelompok rentan perlu terus didorong menjadi kelas menengah yang tangguh



Upaya pengentasan kemiskinan memastikan masyarakat miskin dan rentan terinklusi secara sosial dan ekonomi (***dual inclusion***).

Susenas Maret **2018** mencatat hanya 13,63% Rumah Tangga (RT) yang memiliki *dual inclusion* dan masih terdapat 45,70% rumah tangga yang berada dalam eksklusi sosial.



## RT terinklusi secara sosial:

- a. Anggota RT sedang/ telah menempuh pendidikan minimal lulus SMP (usia 19-64 thn) atau lulus SD (usia >=65 thn).
- b. Dapat mengakses listrik, sanitasi, dan air minum layak.

## RT terinklusi secara ekonomi:

- a. Pendapatan/pengeluaran perkapita lebih rendah dari Garis Kemiskinan
- b. Semua pekerja 15 thn keatas memiliki asuransi kesehatan atau asuransi ketenaga-kerjaan.
- c. Penduduk usia 60 thn ke atas memiliki jaminan pensiun.

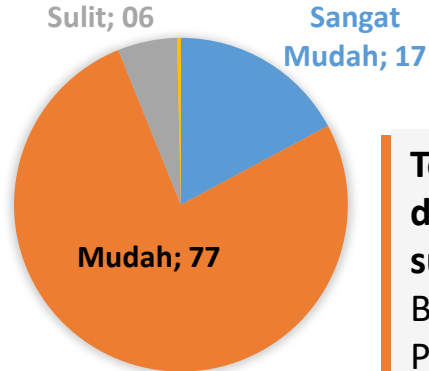
Sumber: Susenas Maret 2018, diolah Bappenas



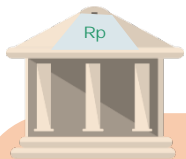
# Akses Layanan Keuangan untuk KUR dan Bank Umum untuk Penduduk Miskin Perlu Diperkuat dan Ditingkatkan



Akses Ke Bank Umum Pemerintahan (BRI, BNI, Mandiri, BPD, Dan BTN)

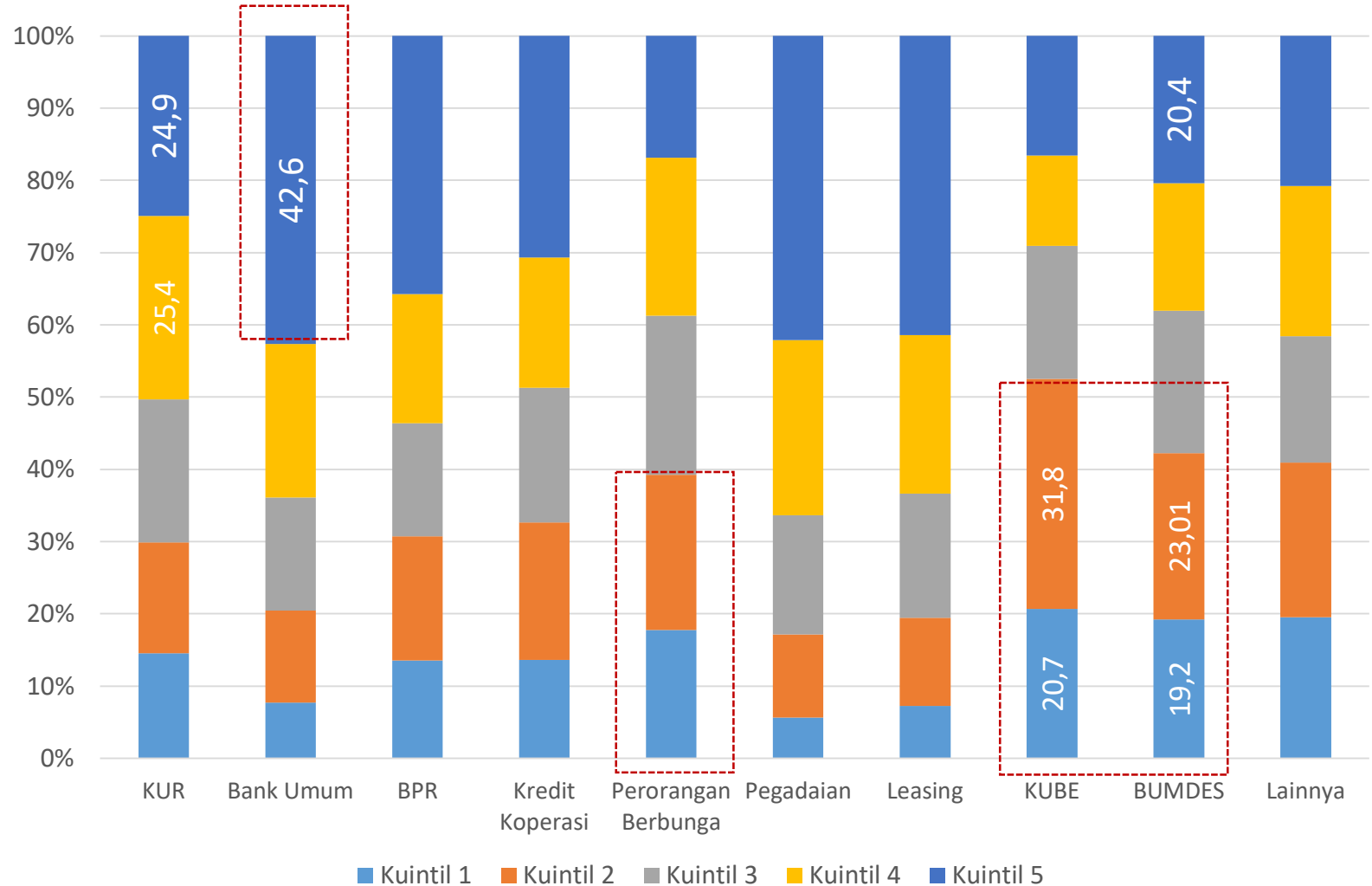


Terdapat 6% desa yang sangat sulit mencapai ke Bank Umum Pemerintah terdekat



- Layanan **KUR** lebih banyak diakses oleh penduduk menengah ke atas (kuintil 4 dan 5).
- Penduduk miskin (kuintil 1) banyak yang mengakses **KUBE, BUMDES, dan pinjaman perorangan (berbunga)**.

Akses Layanan Keuangan Antar Kelompok Pendapatan di Jawa Barat, 2018



Sumber: Susenas dan Podes 2018 diolah Bappenas



# HATUR NUHUN KANA PERHATOSANNA